

ABSTRAK

Pemulihan pariwisata pasca-pandemi COVID-19 memicu lonjakan kunjungan wisatawan internasional ke Jepang yang melahirkan fenomena *overtourism* dan menimbulkan dampak terhadap stabilitas sosial, identitas budaya, serta kualitas hidup masyarakat lokal, terutama di Kyoto, Osaka, dan Tokyo. Penelitian ini menganalisis kebijakan Pemerintah Jepang terhadap *overtourism* sebagai isu keamanan nasional menggunakan kerangka teori sekuritisasi Copenhagen School yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Teori ini memandang sekuritisasi sebagai proses di mana suatu isu dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial melalui narasi oleh aktor yang berwenang, diterima oleh audiens, dan kemudian melegitimasi penerapan tindakan luar biasa di luar jalur politik normal. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Jepang menjalankan proses sekuritisasi melalui pemingkasan narasi ancaman, penerimaan narasi oleh masyarakat domestik, serta penerapan kebijakan luar biasa berupa pengendalian arus wisatawan, pemanfaatan teknologi *Tourism DX*, dan penyebaran wisatawan ke destinasi regional. Meski demikian, efektivitas kebijakan masih bersifat parsial karena gangguan yang dirasakan masyarakat lokal di kawasan wisata utama masih terus berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sekuritisasi isu non-tradisional tidak hanya bergantung pada konstruksi ancaman dan legitimasi kebijakan, tetapi juga pada efektivitas implementasinya di tingkat masyarakat lokal.

Kata Kunci: *overtourism*, sekuritisasi, Jepang, pasca-COVID-19